

## **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

<sup>1</sup>| I Gusti Ayu Krisna Dewi, <sup>2</sup>| Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi

Program Studi Akuntansi Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>| krisnadewi24.kd@gmail.com<sup>1</sup>, <sup>2</sup>| ekadianita@undiksha.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali (studi empiris pada SKPD Provinsi Bali). Jenis riset ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 156 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali; (2) sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali; dan (3) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** kompetensi, sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan

### **Abstract**

*This Study aims to determine the effect of human resource competence, regional financial accounting systems (SAKD), and internal control systems on the quality of the financial statements of the provincial government of Bali (empirical study on the SKPD of the Province of Bali). The type of research is quantitative research. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. Using a sample of 156 taxpayers. The data collection technique was questionnaire. The data analysis used multiple linear regression with the help of SPSS 20.*

*The results of the study show that: (1) human resource competence has a positive effect on the quality of the financial statements of the provincial government of Bali; (2) the regional financial accounting system (SAKD) has a positive effect on the quality of the financial statements of the provincial government of Bali; and (3) internal control system has a positive effect on the quality of the financial statements of the provincial government of Bali.*

**Keywords:** competence, human resources, regional financial accounting systems (SAKD), internal control system, quality of financial reports

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan *financial* pada sektor publik dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Anggreni dkk., 2018). Fenomena pelaporan financial pemerintah daerah sangat perlu untuk diteliti kembali. Dalam rangka memberikan sebuah informasi yang berguna dan bermanfaat, maka instansi pemerintah

mempunyai keharusan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah dibuat, akan tetapi hanya sedikit instansi pemerintah daerah yang melaksanakan hal tersebut (Trisnawati, 2018). Sehingga, masyarakat menuntut adanya transparansi laporan keuangan. Selain itu jika dilihat di beberapa bagian daerah di Indonesia kenyataannya yaitu

masih tertutupnya pengelolaan keuangan yang dilakukan, ini berarti bahwa transparansinya masih bisa dikatakan kurang (Kompasiana.com, 2018). Pengelolaan keuangan yang tertutup ini dapat menjadi kesempatan bagi para pejabat untuk melakukan perbuatan yang tidak patut seperti halnya kecurangan, penggelapan, manipulasi dan sebagainya. KPK menangkap sebanyak 15 kepala daerah pada tahun 2018 (Liputan6.com, 2018). Dengan demikian dapat diketahui bahwa umumnya transparansi di daerah masih kurang dan masyarakat menuntut adanya transparansi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah atas penggunaan sumber daya serta penggunaan APBN dan APBD

Berlandaskan PP No. 8 Tahun 2006 laporan keuangan yaitu suatu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama suatu periode. LKPD yang baik dan memuat informasi yang berkualitas akan membuktikan bahwa pemerintah telah dapat mengikuti ketentuan ataupun prosedur untuk melaporkan laporan keuangan yang patut dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Maka dari itu sangat penting untuk membuat, menyusun, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan yang efektif, efisien, dan berkualitas. BPK dalam menilai hal tersebut dapat dinyatakan dalam 4 jenis opini yakni WTP, WDP, TMP dan TW (Setiawan dan Gayatri, 2017). Fakta yang ada di lapangan yaitu masih adanya LKPD yang belum mampu mencapai opini WTP dan masih banyak ditemukan persoalan mengenai ketaatan terhadap perundang-undangan serta SPI. Diantara pemerintah daerah yang ada, pemerintah Provinsi Bali salah satu yang masih mencapai penilaian WTP atas LKPD. Selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2013-2018 Pemerintah Provinsi Bali mampu mempertahankan opini WTP atas LKPD. Penilaian yang diberikan BPK membuktikan jika LKPD Provinsi Bali sudah disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana sebelumnya LKPD Provinsi Bali tahun 2012

memperoleh opini WDP. Ini membuktikan jika kualitas LKPD pemerintah Provinsi Bali belum sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun 2012. Para pemangku kepentingan akan percaya atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah melalui opini yang diberikan oleh BPK (Kiranayanti dkk.,2016). Walaupun Pemerintah Provinsi Bali mampu meraih opini WTP, disisi lain predikat WTP yang diperoleh masih terdapat catatan dari BPK yang direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk segera diperbaiki.

LKPD Provinsi Bali tahun 2018 dilakukan pemeriksaan oleh BPK, adapun temuan BPK atas LKPD Provinsi Bali yaitu menemukan adanya: 1) Penatausahaan Aset Tetap dan Aset lainnya belum sepenuhnya memadai, 2) Pengelolaan belanja hibah TA 2018 belum seutuhnya memadai, dan 3) Pengelolaan dana bos pada SMA/SMKN/SLB TA 2018 belum seutuhnya sesuai ketetapan (BPK, 2019). Selain itu pada LKPD Provinsi Bali tahun sebelumnya yaitu pada tahun anggaran 2017, adapun temuan BPK yaitu sebagai berikut: 1) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali pada PT Mergantaka Mandala belum jelas, 2) Pemungutan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya tertib, 3) Peraturan gubernur tentang standar harga satuan provinsi belum mengatur besaran standar harga sewa kendaraan, dan 4) Penatausahaan aset tetap pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai (BPK, 2018). Walaupun pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini WTP, di lain pihak perlu adanya peningkatan serta perbaikan yang harus dilakukan. Penilaian WTP yang diperoleh akan lebih berkualitas, jika tidak ada catatan dan temuan beberapa permasalahan. Permasalahan kelemahan yang lebih terkait ke SPI di atas tersebut umumnya dapat terjadi salah satunya karena belum optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, belum maksimalnya SDM dalam mengerti akuntansi, dan sistem yang digunakan belum maksimal diterapkan.

Bersumber pada PP Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja merupakan karakter dasar, dan

keahlian-keahlian yang unggul dari perseorangan yakni keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang digunakan dalam rangka mencapai kinerja yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan atau kewajiban. Kompetensi SDM dibutuhkan dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan pemerintah, penyusunan laporan keuangan yang baik, transparan dan terhindar dari kesalahan pencatatan maupun perhitungan. Kompetensi SDM yakni SDM yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai pada tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik (Saraswati dan Budiasih, 2019).

SDM yang mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal dengan demikian segala tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. SDM yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami apa yang seharusnya dilaksanakan menyebabkan laporan keuangan dibuat dan disajikan sesuai dengan waktunya (Anggreni dkk., 2018). Hasil riset dari Saraswati dan Budiasih (2019), Karsana dan Suaryana (2017), serta Sanjaya (2019) menghasilkan hasil yaitu kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Atas ulasan tersebut, asumsi atau pernyataan sementara yang diajukan yaitu: **H<sub>1</sub>: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.**

Tersedianya sebuah sistem yang mendukung kinerja para pegawai sangat diperlukan. Menurut Renyowijoyo (2013) akuntansi keuangan daerah yakni akuntansi yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mampu membuat informasi berupa laporan keuangan yang akurat, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem yang mendukung yaitu SAKD. Kehadiran dari adanya sistem akuntansi benar-benar berperan penting, hal tersebut

dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017). Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan yang dibuat supaya relevan, andal, dapat dipercaya, maka SKPD wajib untuk mempunyai sistem akuntansi yang andal. SAKD ini benar-benar mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan sangat mendukung kinerja para penyusun dalam menghasilkan laporan keuangan. Dengan adanya SAKD ini maka memperlancar aparat dalam menghasilkan informasi berupa laporan keuangan dengan lengkap, akurat, efisien, efektif dan keterandalan laporan keuangan dapat tercapai. Adapun riset dari Pujanira dan Taman (2017), serta Sanjaya (2019) menghasilkan hasil yakni penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari ulasan tersebut, asumsi atau pernyataan sementara kedua yang diajukan yaitu:

**H<sub>2</sub>: sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.**

Berlandaskan PP No. 60 Tahun 2008 menjelaskan mengenai SPI yakni suatu prosedur yang terintegrasi pada perbuatan dan aktivitas yang dilaksanakan berulang kali oleh atasan serta semua staf tenaga kerja dalam memberikan kepastian memadai atas tergapainya target organisasi dengan aktivitas atau tindakan yang efektif dan baik, ketaatan pelaporan keuangan, perlindungan aset Negara dan ketaatan pada aturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan yang dibuat dan dihasilkan oleh instansi pemerintah juga dipastikan atas seberapa baik SPI yang diterapkan (Karsana dan Suaryana, 2018).

Penerapan pengendalian intern yang benar dan baik pada suatu pemerintahan akan dapat mencegah terjadinya penggelapan dan risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan. Adapun hasil riset dari Sari dkk., (2017), Karsana dan Suaryana (2017), dan Saraswati dan Budiasih (2019) membuktikan jika SPI mempunyai

pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Atas ulasan diatas, asumsi atau pernyataan sementara yaitu:

**H<sub>3</sub>: sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.**

Atas uraian pemaparan yang dijelaskan diatas, maksud dari riset yang dilaksanakan yakni untuk menguji, pengaruh kompetensi sumber daya manusia sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.

### METODE

Tempat yang menjadi objek pada penelitian yang dilaksanakan ini yakni pada SKPD Provinsi Bali sejumlah 26. Riset ini termasuk pada kategori penelitian kuantitatif. Data primer adalah data yang dipakai pada riset ini. Populasi pada riset ini yaitu semua pegawai sub bagian keuangan pada 26 SKPD Provinsi Bali yang terdiri atas dinas dan badan. Adapun cara dalam pengambilan sampel yakni *purposive sampling*. Kriteria yang dipergunakan yakni pegawai yang bekerja sebagai kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan dengan lama bekerja minimum 1 tahun. Jumlah sampel yang akan digunakan berdasarkan kriteria sampel yang dijelaskan yaitu 156 responden. Teknik analisis data yang akan dipakai yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri atas normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda, koefisien determinasi (Adjust R<sup>2</sup>) dan uji t.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan dengan cara mengedarkan angket sebanyak 156, dari 156 yang diedarkan yang bisa untuk dipergunakan yakni sebanyak 156 sehingga tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Bersumber pada perolehan analisis uji statistik deskriptif, untuk variabel kompetensi SDM yang didapatkan dari 156 responden memiliki nilai *minimum* yaitu 21 dan nilai *maximum* yaitu 30 dan nilai *mean* yaitu 25,94 serta standar deviation yaitu 2,026. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang didapatkan dari 156 responden memiliki nilai *minimum* (nilai terendah) yaitu sebesar 42 dan *maximum* yaitu 75, dan *mean* yaitu 64,60 serta standar deviation yaitu 5,965. Variabel sistem pengendalian intern yang didapatkan dari 156 responden memiliki nilai *minimum* (nilai terendah) yaitu sebesar 45 dan nilai *maximum* yaitu 75, dan *mean* yaitu 63,92 serta standar deviation yaitu 5,480. Variabel kualitas laporan keuangan yang didapatkan dari 156 responden memiliki nilai *minimum* (nilai terendah) yaitu 26 dan nilai *maximum* (nilai tertinggi) yaitu 40, dan *mean* yakni 34,83 dan Standar deviation yaitu 3,031.

Hasil dari pengujian uji validitas memperlihatkan yaitu semua nilai *Pearson Correlation* > r tabel yakni 0,1572 serta nilai dari signifikansinya < 0,05. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa instrumen yang digunakan bisa dinyatakan valid. Perolehan hasil dari uji reliabilitas membuktikan bahwa semua variabel yang dipakai yakni mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Jadi, bisa ditarik kesimpulan jika instrument yang digunakan ini bisa dinyatakan reliabel.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
<b>N</b>		156
<b>Normal Parameters<sup>a,b</sup></b>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,99899749
<b>Most Extreme Differences</b>	Absolute	0,039

	Positive	0,039
	Negative	-0,034
<b>Kolmogorov-Smirnov Z</b>		0,485
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		0,973

Sumber: data diolah, 2020

Suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai Sig  $\geq 0,05$ . Bersumber dari perolehan hasil uji normalitas diatas, maka diperoleh hasil yaitu Asymp. Sig. (2-tailed) nilainya adalah  $0,973 > 0,05$ . Jadi, kesimpulan yang didapatkan yaitu data berdistribusi normal karena  $0,973 > 0,05$ .

Uji Multikolinearitas bermaksud untuk menguji atau mengetahui

terdapat/tidaknya ikatan atau jalinan antar variabel bebas pada model regresi. Nilai toleransi lebih besar dari 0,10 / sama dengan VIF  $< 10$ , ini menandakan yaitu tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Perolehan hasil output dari uji ini disajikan pada tabel dibawah yaitu:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )	0,946	1,057	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ( $X_2$ )	0,552	1,812	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern ( $X_3$ )	0,560	1,787	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2020

Bersumber dari perolehan hasil diatas, *Tolerance* tiap-tiap variabel yakni lebih dari 0,10 dan juga VIF yang mendapatkan nilai  $< 10$ . Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

Model regresi yang bagus yakni homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual*  $> 0,05$  ini memiliki arti yaitu tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Perolehan hasil dari uji tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,486	1,552			0,957	0,340
Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )	0,029	0,049	0,050		0,598	0,551
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ( $X_2$ )	-0,019	0,022	-0,093		-0,855	0,394
Sistem Pengendalian Intern ( $X_3$ )	0,009	0,023	0,040		0,372	0,711

Sumber: Data diolah, 2020

Bersumber pada tabel 3 diatas,  $X_1$  nilai signifikansi yakni  $0,551 > 0,05$ ,  $X_2$

mempunyai nilai signifikansi yakni  $0,394 > 0,05$ , serta  $X_3$  mendapatkan nilai

signifikansi  $0,711 > 0,05$ . Dengan demikian, kesimpulannya yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis regresi linier berganda membuktikan pengaruh hubungan antara

variabel independen terhadap variabel dependen. Perolehan hasil output dari uji tersebut yaitu:

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,211	2,615		0,463	0,644
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,333	0,082	0,222	4,045	0,000
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (X2)	0,191	0,037	0,376	5,229	0,000
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,198	0,040	0,357	4,995	0,000

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, adapun persamaan regresinya yakni:  $Y = 1,211 + 0,333X_1 + 0,191X_2 + 0,198X_3 + \epsilon$ . Nilai konstanta yaitu 1,211 memperlihatkan bahwa X1, X2, dan X3 memiliki nilai nol (0) dengan demikian nilai kualitas laporan keuangan Y mengalami kenaikan sebesar nilai dari konstanta tersebut yaitu sebesar 1,211 satuan.

X1 nilai koefisien regresinya yaitu 0,333 dan bertanda positif. Bernilai positif juga menandakan adanya hubungan yang searah atau X1 berpengaruh positif terhadap kualitas Y. Ini bermakna yaitu jika kompetensi sumber daya manusia (X1) mengalami peningkatan atau naik 1 satuan maka Y atau kualitas laporan keuangan akan menjadi meningkat sejumlah 0,333 dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya konstan atau tetap.

X2 nilai koefisien regresi yakni 0,191 dan positif. Bernilai positif menandakan bahwa terdapat hubungan searah atau

SAKD (X2) berpengaruh positif terhadap Y. Ini bermakna yaitu jika SAKD X2 mengalami peningkatan atau naik 1 satuan dengan demikian Y atau kualitas laporan keuangan akan meningkat 0,191 dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya konstan atau tetap.

X3 nilai koefisien regresi yakni 0,198 dan positif. Bernilai positif juga menandakan bahwa adanya hubungan yang searah atau SPI (X3) berpengaruh positif terhadap Y. ini bermakna yaitu jika SPI (X3) mengalami peningkatan atau naik 1 satuan maka Y akan meningkat sejumlah 0,198 dengan anggapan bahwa variabel bebas lainnya konstan atau tetap.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipakai dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menunjukkan variasi variabel Y atau dependen. Perolehan hasil dari uji tersebut sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,752 <sup>a</sup>	0,565	0,557	2,019

Sumber: Data diolah, 2020

Bersumber pada hasil perolehan diatas, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,557. Nilai yang diperoleh sebesar 0,557 memiliki arti sebesar 55,7% variabel Y dipengaruhi

oleh variabel yang dipergunakan pada riset ini, serta sisanya sejumlah 44,3% dipengaruhi oleh faktor diluar variabel yang digunakan atau diuji pada riset ini.

Uji statistik  $t$  yaitu uji yang dipergunakan dalam rangka mengetahui pengaruh satu variabel penjelas/independen secara perseorangan atau personal dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil perolehan uji  $t$  (secara parsial) disajikan pada tabel 4. Diketahui yaitu  $X_1$  memiliki nilai  $t_{hitung}$  yaitu  $4,045 >$  nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $1,9757$  dan nilai signifikansinya yakni  $0,000 < 0,05$ ,  $X_2$  yakni variabel SAKD memiliki  $t_{hitung}$  yaitu  $5,229 >$   $t_{tabel}$  yaitu  $1,9757$  dan nilai signifikansinya yakni  $0,000 < 0,05$ , dan  $X_3$  yakni variabel SPI memiliki  $t_{hitung}$  yaitu  $4,995 >$  nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $1,9757$  dan nilai signifikansinya yaitu  $0,000 < 0,05$  yang memiliki arti yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_1, H_2, H_3$  diterima. Jadi, kesimpulan yang diperoleh yakni kompetensi SDM, SAKD dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Bersumber pada perolehan uji statistik, terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yaitu sejumlah  $4,045 >$  nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $1,9757$  dan nilai signifikansi yakni  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_1$  diterima. Variabel  $X_1$  mempunyai ikatan yang sejalan dengan variabel  $Y$  yang ditunjukkan dari nilai  $t$  yang positif. Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang didapatkan yaitu kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali. Sehingga dengan demikian apabila kompetensi SDM yang semakin baik dan meningkat maka semakin baik dan meningkat juga kualitas laporan keuangan.

SDM yang mempunyai kualitas yang baik, memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan serta mempunyai pendidikan dengan latar belakang yang sesuai dengan tanggungjawabnya yaitu akuntansi dan keuangan, akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang baik (Saraswati dan Budiasih, 2019). Kompetensi SDM dibutuhkan dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan pemerintah, penyusunan laporan keuangan yang baik, transparan dan terhindar dari kesalahan pencatatan maupun perhitungan. SDM yang

mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal dengan demikian segala tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. SDM yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami apa yang seharusnya dilaksanakan menyebabkan laporan keuangan dibuat dan disajikan sesuai dengan waktunya (Anggreni dkk., 2018). Hasil riset Saraswati dan Budiasih (2019), Karsana dan Suaryana (2017), serta Sanjaya (2019) membuktikan yaitu kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Bersumber pada uji statistik, terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yaitu sejumlah  $5,229 >$   $t_{tabel}$  yaitu  $1,9757$  dan nilai signifikansinya yaitu  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_2$  diterima. Variabel  $X_2$  yaitu SAKD memiliki hubungan yang sejalan dengan variabel  $Y$  hal tersebut ditunjukkan dari nilai  $t$  yang positif. Sehingga kesimpulan yang didapatkan yaitu SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali. Jadi, jika SAKD yang dimiliki semakin baik dan meningkat maka kualitas laporan keuangan akan meningkat dan baik.

Adanya Kehadiran sebuah sistem akuntansi sangat berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017). Untuk mampu membuat informasi berupa laporan keuangan yang akurat, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem yang mendukung yaitu SAKD. Kehadiran dari adanya sistem akuntansi benar-benar berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017). Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan yang dibuat supaya relevan, andal, dapat dipercaya, maka SKPD wajib untuk mempunyai sistem akuntansi yang andal. SAKD ini benar-benar mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan sangat mendukung kinerja para penyusun dalam menghasilkan laporan keuangan. Dengan

adanya SAKD ini maka memperlancar aparat dalam menghasilkan informasi berupa laporan keuangan dengan lengkap, akurat, efisien, efektif dan keterandalan laporan keuangan dapat tercapai. Adapun hasil Riset Pujanira dan Taman (2017), serta Sanjaya (2019) membuktikan penerapan SAKD berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Bersumber pada uji statistik didapatkan nilai  $t_{hitung}$  yaitu  $4,995 > t_{tabel}$  yaitu  $1,9757$  dan nilai signifikansinya yaitu  $0,000 < 0,05$  yang memiliki artinya  $H_3$  diterima. Variabel  $X_3$  mempunyai kaitan yang sejalan dengan variabel  $Y$  yang ditunjukkan dari nilai  $t$  yang positif. Jadi, kesimpulan yang didapatkan yaitu SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali. Penerapan SPI yang semakin bagus maka akan semakin bagus dan berkualitas juga laporan keuangan yang dihasilkan.

LKPD yang dihasilkan dengan baik dan lengkap, hal tersebut ditentukan oleh baik tidaknya pengendalian internal yang dimiliki instansi pemerintah (Karsana dan Suaryana, 2018). Penerapan pengendalian intern yang baik pada suatu pemerintahan akan mampu mencegah terjadinya penggelapan, risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan. Hasil riset dari Sari dkk., (2017), Karsana dan Suaryana (2017), serta Saraswati dan Budiasih (2019) membuktikan yaitu SPI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

Adapun kesimpulan atas pemaparan diatas yakni: (1) Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali, (2) SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali. Ini berarti bahwa SAKD yang semakin baik dan meningkat akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan

yang dihasilkan, dan (3) SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali. Ini berarti bahwa dengan adanya penerapan SPI yang semakin bagus maka akan semakin bagus pula kualitas laporan keuangan.

Berlandaskan atas pemaparan diatas, maka implikasi teoritis riset ini yaitu akan memberikan manfaat pengetahuan bagi para pembaca dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu bisa dipergunakan sebagai referensi dan bantuan pemikiran bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Selain itu adapun implikasi praktis penelitian ini yaitu: (1) pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM menjalankan tugas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan waktunya serta berkualitas dibantu dengan pengetahuan yang dimiliki, memiliki pengalaman yang memadai di sektor akuntansi, mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu akuntansi, rutin mengikuti pelatihan maupun pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun instansi lainnya, (2) pemerintah Provinsi Bali dapat menerapkan SAKD salah satunya dalam hal prosedur akuntansi yang dilakukan dengan benar, berjalan dengan baik dan sesuai dengan SAKD. Adanya Kehadiran dari sebuah sistem akuntansi sangat berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017), (3) pemerintah Provinsi Bali dapat menerapkan dan melaksanakan SPI dengan baik, penerapan pengendalian intern yang baik pada suatu pemerintahan akan mampu mencegah terjadinya penggelapan, risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan. (4) penelitian yang telah dilaksanakan ini hasilnya dapat dipergunakan sebagai tambahan sumber literatur atau referensi bagi mahasiswa yang lain dalam melakukan penelitian dengan topik atau tema yang serupa, dan (5) hasil penelitian



ini dapat dipergunakan sebagai tambahan sumber literature atau kepustakaan di perpustakaan Undiksha dalam bidang akuntansi dan dapat dipergunakan sebagai tambahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai laporan keuangan.

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil riset yang sudah dipaparkan diatas yaitu sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Provinsi Bali, berdasarkan data hasil statistik deskriptif, dimana kompetensi SDM, SAKD, SPI, dan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi Bali belum maksimal sehingga, pemerintah Provinsi Bali perlu untuk lebih memaksimalkan dan meningkatkannya. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan untuk bisa lebih terus meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki dengan melaksanakan kegiatan diklat atau pendidikan dan pelatihan rutin pada pegawai atau staf dibidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian dan pemahaman pegawai atau staf dalam penyusunan laporan keuangan agar mereka lebih mampu dalam menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik lagi. Selain itu perlu adanya penguatan dan peningkatan implementasi atau penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan mengadakan sosialisasi terkait dengan sistem yang digunakan dan perlu adanya penguatan dan peningkatan implementasi atau penerapan SPI di lingkungan instansi yang dilaksanakan oleh pimpinan serta seluruh pegawai agar segala kegiatan yang dilaksanakan dapat diawasi dan diarahkan sehingga tidak menyimpang dari prosedur dan standar yang telah ditetapkan, (2) bagi peneliti berikutnya, disarankan bersumber pada perolehan dari uji koefisien determinasi  $R^2$  (*adjust R square*) yang memiliki nilai 55,7% serta sisanya yakni 44,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel yang dipakai atau diuji. Sehingga, bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lainnya selain yang dipergunakan pada penelitian ini seperti misalnya, komitmen organisasi, efektivitas penerapan SAP, atau variabel lainnya yang dapat mempengaruhi, dan (3) bagi masyarakat, selaku *principal*

disarankan untuk ikut peduli atau ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan mengenai kinerja dari pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan. Sehingga, masyarakat mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah dibuat serta pemerintah akan terus melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah.

### Daftar Pustaka

- Anggreni, Ni Made Mei dkk. 2018. "Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22.1, Januari (2018):352-380.
- Anonim. 2018. " 18 Kepala Daerah Jadi Tersangka KPK Sepanjang 2018". Tersedia pada <https://www.liputan6.com/news/read/3668885/18-kepala-daerah-jadi-tersangka-kpd-sepanjang-2018> (diakses tanggal 13 Februari 2020).
- BPK. "Anggota VI BPK RI Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Bali" (<https://denpasar.bpk.go.id/?p=14621> ) Diakses tanggal 9 Desember 2019.
- BPK. "Hasil Pemeriksaan LKPD: (<https://denpasar.bpk.go.id/?pageid=59>). Diakses tanggal 9 Desember 2019.
- BPK. "Penyerahan LHP LKPD TA 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali Seluruh Wilayah di Bali Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian". (<https://denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/LHP-LKPD-TA-2017.pdf>). Diakses Tanggal 20 Januari 2020.
- Darmawan, Ayang dan Darwanis. 2018. "Pengaruh Sistem Pengendalian

- Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 3 No, Halaman 9-19.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Karsana, I Wayan dan I Gusi Ngurah Agung Suaryana. 2017. "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 21.1, Oktober.
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.2, Agustus:1290-1318.
- Liing, Firminus Oscar. 2018. "Transparansi dalam Pemerintahan". Tersedia pada <https://www.kompasiana.com/firminus03858/5bec3f0cc112fe631b436bd2/transparansi-dalam-pemerintahan?page=all>. (diakses tanggal 13 Februari 2020).
- Mardani, Lueki Bighandy dan Entot Suhartono. 2019. "Analisis Pengaruh Sistem Informasi Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pemerintahan Kota Semarang)". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Volume 10 Nomor 2, November 2019.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pujanira, Putriasri dan Abdullah Taman. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY". *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Volume 6, Nomor 2.
- Renyowijoyo, H. Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Kencana Media.
- Sanjaya, Putu Tomi. 2019. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Saraswati, I Gusti Ayu Gita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2019. "Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 27.3, Juni:2268-2292.
- Sari, Luh Putu Purwita, dkk. 2016. "Pengaruh Penerapan Standar

- Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada BPKAD Kabupaten Badung)". *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, Vol 1, No 1.
- Setiawan, I Wayan Nico dan Gayatri. 2017. "Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja pada Kualitas Laporan Keuangan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 21,1 Oktober(2017):671-700.
- Syachnanda, Firda Dwi. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Ekuitas Bandung.
- Trisnawati, Ni Nyoman dan Dewa Nyoman Wiratmaja. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-jurnal Akuntansi*, 768-792.
- Triwardana, Dhedy dkk. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)*. Diss. Riau University.